

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 7 April 2014.



Lembar Data Proyek

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

Tanggal Pembuatan PDS –

PDS Diperbarui 20 Mar 14

Nama Proyek Peningkatan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (nama sebelumnya: Proyek Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Jawa Timur)

Negara Indonesia

Nomor Proyek/Program 46165-002

Status Diusulkan

Lokasi Geografis –

Dalam menyiapkan program atau strategi negara, atau pembiayaan proyek mana pun, atau dengan menyebut atau merujuk wilayah atau daerah geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian apa pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah.

Klasifikasi Sektor dan/atau Subsektor Energi
/ Pembangunan Sektor Energi

Klasifikasi Tematik –

Kategori Pengarusutamaan Gender –

■ Pembiayaan

Jenis/Cara Bantuan	Nomor Persetujuan	Sumber Pendanaan	Nilai yang Disetujui (ribu dollar)
Pinjaman	–	Sumber daya modal biasa	360.000
–	–	Mitra	150.000
TOTAL			US\$ 510.000

■ Kategori Perlindungan

Untuk informasi lebih jauh mengenai kategori perlindungan, lihat <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

Lingkungan

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

Masyarakat Adat

■ Ringkasan Persoalan Lingkungan dan Sosial

Aspek Lingkungan

Proyek ini memiliki klasifikasi pendahuluan A untuk aspek lingkungan (subproyek Jawa Timur berada dalam kategori B, dan proyek Warsamson berada dalam kategori A).

Pemindahan Bukan dengan Sukarela

Proyek yang mencakup Sutami, Kesamben, dan Warsamson akan memerlukan akuisisi tanah dan pemindahan permukiman sehingga masuk kategori A. Klasifikasi subproyek adalah sebagai berikut: Sutami berada dalam kategori B, sedangkan Kesamben dan Warsamson berada dalam kategori A.

Masyarakat Adat

Proyek yang diusulkan akan berdampak bagi masyarakat adat yang menetap di area proyek. Sebagian di antaranya kemungkinan memerlukan relokasi fisik untuk proyek Warsamson di Papua Barat. Tidak ada masyarakat adat yang terdampak pada proyek Jawa Timur, sehingga proyek berada dalam kategori C, sedangkan Warsamson berada dalam kategori A

■ Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Selama Rancangan Proyek

Konsultasi yang bermakna akan dilakukan, baik selama Bantuan Teknis dan akan diteruskan secara berkelanjutan sepanjang siklus proyek. Pandangan dan pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan akan diminta terkait potensi dampak proyek, pemindahan permukiman, risiko sosial, dan langkah mitigasi. Berbagai metode yang akan digunakan untuk konsultasi mencakup: (i) pertemuan konsultasi publik dan diskusi kelompok fokus bersama masyarakat adat atau penduduk yang berpotensi terdampak; (ii) survei rumah tangga secara terbatas; (iii) pertemuan dan wawancara dengan pejabat pemerintah pada tingkat nasional maupun lokal, serta (iv) pertemuan dengan pemimpin informal atau kelompok di semua area proyek dan dewan masyarakat adat di Papua Barat. Bantuan Teknis ini akan memfasilitasi kajian dampak sosial dan lingkungan, serta mendorong perencanaan partisipatif sehingga masyarakat setempat dapat menyuarakan pendapat mereka mengenai proyek ini dan potensi dampaknya, serta langkah mitigasi yang sesuai. Dukungan/persetujuan masyarakat secara luas diupayakan, karena proyek di Papua Barat mungkin berdampak pada pemindahan fisik masyarakat adat dari tanah tradisional/adat. Proses konsultasi dengan masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat, rekomendasi, serta kesepakatan formal apa pun yang dicapai akan dicatat dengan baik. Jika terjadi ketidaksepahaman yang besar antara proyek dan masyarakat adat terdampak mengenai rancangan proyek, Rancangan Masyarakat Adat (*indigenous people plan/IPP*), atau pelaksanaan kegiatan IPP, akan dilakukan proses negosiasi dengan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan.

Selama Pelaksanaan Proyek

Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat atau masyarakat adat yang terdampak, beserta masyarakat umum termasuk kaum miskin, kelompok masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya akan diajak berkonsultasi secara intens selama pelaksanaan proyek.

■ Uraian

■ Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional

A. 1. Proyek ini akan memberikan pinjaman proyek senilai \$360 juta kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air (HPP) berkapasitas hampir 184 megawatt (MW) di sektor publik pada dua lokasi di Jawa Timur dan satu lokasi di Papua Barat. Dua subproyek di Jawa Timur adalah - (i) ekspansi HPP Sutami (Unit IV dan V - 2x50 MW) dan (ii) HPP Kesamben (Unit I dan II - 2x18,5 MW). Subproyek di Papua Barat adalah HPP Warsamson (Unit I-III 3x15,5 MW). 2. Proyek tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan listrik yang terus naik di Indonesia, melalui sumber daya energi bersih. Proyek ini merupakan bagian dari rencana pengembangan listrik jangka panjang oleh badan usaha milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek ini secara langsung mendukung pertumbuhan inklusif dan kelestarian lingkungan yang merupakan pilar penting Strategi Kemitraan Negara ADB 2012-2014 untuk Indonesia. Proyek ini diikutsertakan dalam Country Operations Business Plan (COBP) yang kini sedang diperbarui. Warsamson diikutsertakan dalam daftar proyek pemerintah yang akan dibiayai pada 2014 menggunakan bantuan luar negeri, dan saat ini sedang dibicarakan bersama pemerintah untuk memasukkan subproyek Jawa Timur pada daftar proyek pasca-2014. Dukungan bagi pengembangan energi terbarukan juga digaribawahi dalam kebijakan sektor energi ADB 2009, serta kajian, strategi, dan peta langkah (Assessment, Strategy and Roadmap/ASR) untuk sektor energi Indonesia (2012). ASR kini sedang diperbarui. 3. Dengan tujuan transformasi Indonesia menjadi negara maju paling lambat tahun 2025, pemerintah pada Mei 2011 meluncurkan rencana induk 14 tahun untuk mempercepat pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Rencana pertumbuhan jangka menengah diarahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 (RPJMN) yang intinya merupakan pembangunan infrastruktur. RPJMN memadukan tiga elemen utama: (i) mengembangkan potensi ekonomi daerah di enam koridor ekonomi, termasuk Jawa dan Sumatra; (ii) memperkuat konektivitas nasional baik secara lokal maupun internasional, dan (iii) memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan sains dan teknologi nasional untuk menunjang pengembangan program utama pada keenam koridor ekonomi tersebut. Pembangunan infrastruktur, terutama tambahan pembangkit listrik, merupakan prasyarat untuk mendorong kegiatan pembangunan di setiap sektor yang teridentifikasi dalam RPJMN. 4. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, kapasitas terpasang pembangkitan listrik di Indonesia diproyeksikan akan naik dari sekitar 35 gigawatt (GW) menjadi hampir 85 GW. Kekurangan listrik sejak dulu menjadi hambatan infrastruktur yang paling berat di seluruh Indonesia. Sejak 2006, telah dilaksanakan dua program percepatan yang dirancang untuk membangun kapasitas pembangkitan listrik 20.000 MW paling lambat pada 2018. Program pertama lebih banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya batu bara yang melimpah dan energi terbarukan, sedangkan program kedua berfokus pada sumber energi terbarukan. Indonesia memiliki sejumlah sumber daya energi terbarukan, termasuk tenaga air, angin, matahari, biomassa, dan panas bumi (geotermal). Secara khusus, sumber geotermal dan tenaga air berada di tempat yang tepat untuk menjawab tantangan jangka pendek sektor kelistrikan Indonesia. Secara keseluruhan, pemerintah berencana meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran pembangkitan listrik dari yang saat ini sekitar 11% (7% berupa PLTA) menjadi hampir 19% (11% PLTA) paling lambat pada 2020. 5. Potensi

tenaga air Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 76.000 MW dan sebagian besar berada di Papua. Kapasitas terpasang saat ini sekitar 5.705 MW dan PLN memiliki serta mengoperasikan hampir seluruh (96%) kapasitas tersebut. Rencana induk (master plan) kelistrikan nasional PLN (RUPTL, 2011-2020) menggariskan perlunya pembangunan kapasitas tambahan sebesar 5.722 MW. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air masih menemui banyak hambatan di Indonesia. Biaya modal di muka yang besar, kepatuhan atas perlindungan lingkungan, dan akuisisi tanah terkait beserta prosedur pemindahan permukiman, menjadikan investasi pada pembangkit listrik tenaga air menjadi sangat mahal bagi sektor swasta, maka pemerintahlah yang menjadi pengembangnya karena tidak ada lagi yang mampu. PLN akan menjadi pemilik lebih dari 79% kapasitas baru yang dimasukkan dalam RUPTL saat ini. PLN tidak mampu memperoleh sumberdaya yang diperlukan dari sumber-sumber internal, sehingga mencari pembiayaan jangka panjang dari donor bilateral dan multilateral. Sebagai contoh, Bank Dunia membiayai skema PLTA Upper Cisokan (1.000 MW) dan AfD sedang dalam pembicaraan dengan PLN untuk membiayai Masang 2 (52 MW). KfW baru-baru ini juga memulai uji tuntas untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 150 MW. Keikutsertaan ADB di sektor PLTA masih relatif kecil dan kebanyakan terbatas pada proyek PLTA kecil pada tahun 90-an, serta baru-baru ini di bawah Proyek Sektor Pembangunan Energi Terbarukan. 6. Pemerintah mencari pembiayaan jangka panjang dari ADB untuk memungkinkan PLN membangun kapasitas pembangkitan listrik tenaga air di Jawa Timur dan Papua Barat beserta jalur transmisinya. Proyek investasi ini selaras dengan peta langkah kelistrikan tenaga air Pemerintah dan tingkat kesiapan untuk proyek spesifik.

■ Dampak Pembangunan

Peningkatan pasokan dari pembangkit energi bersih di Indonesia

■ Hasil Proyek

Uraian Hasil	Kemajuan Menuju Hasil
Perluasan kapasitas PLTA di Jawa Timur dan Papua Barat	–

■ Keluaran dan Kemajuan Pelaksanaan

Uraian Keluaran Proyek	Status Kemajuan Pelaksanaan (Keluaran, Kegiatan, dan Persoalan)
1. Dimulainya proyek pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 46,5 MW di Warsamson beserta jalur transmisi terkait 2. Dimulainya dua proyek pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas total 137 MW di Sutami dan Kesamben beserta jalur transmisi terkait 3. Penguatan kapasitas pelaksanaan proyek di PLN	–
Status Tujuan Pembangunan	Perubahan Material
–	–

■ Peluang Bisnis

Tanggal Pencatatan Pertama 5 Des 13

Layanan Konsultasi

Kontrak untuk Perusahaan Konsultan Pelaksanaan Proyek diperkirakan akan disepakati tahun depan.

Pengadaan

–

Pemberitahuan Pengadaan dan Konsultasi

<http://www.adb.org/projects/46165-002/business-opportunities>

■ Jadwal

Persetujuan Konsep 18 Nov 13

Pencarian Fakta 1 Sep 2014 sampai 30 Apr 2015

Rapat Kajian Manajemen 29 Mei 15

Persetujuan –

Misi Kajian Terakhir –

■ Tonggak

No. Persetujuan	Persetujuan	Ditanda-tangani	Efektif	Selesai		
				Orisinal	Direvisi	Aktual
–	–	–	–	–	–	–

■ Pemanfaatan

Tanggal	Nomor Persetujuan	ADB (ribu US\$)	Lainnya (ribu US\$)	Persentase Bersih
Pemberian Kontrak Kumulatif				
–	–	–	–	–
Pencairan Kumulatif				
–	–	–	–	–

■ Status Perjanjian

Perjanjian dipilah-pilah menurut berbagai kategori berikut—laporan keuangan proyek yang diaudit, perlindungan, sosial, sektor, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Pemenuhan terhadap perjanjian dinilai per kategori dengan menerapkan kriteria berikut: (i) Memuaskan—semua perjanjian dalam kategori tersebut telah dipenuhi, namun diperbolehkan maksimum satu pengecualian, (ii) Sebagian Memuaskan—maksimum dua perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi, (iii) Tidak Memuaskan—tiga atau lebih perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi.

No. Persetujuan	Kategori						
	Sektor	Sosial	Keuangan	Ekonomi	Lainnya	Perlindungan	Sektor
Pinjaman -	–	–	–	–	–	–	–

■ Perincian Kontak dan Pembaruan

Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Pradeep Tharakan (ptharakan@adb.org)
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Department, SERD</i>)
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Divisi Energi, SERD (<i>Energy Division SERD</i>)
Lembaga Pelaksana	—

■ Tautan

Situs Web Proyek	http://www.adb.org/projects/46165-002/main
Daftar Dokumen Proyek	http://www.adb.org/projects/46165-002/documents